# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Adanya reformasi pada keuangan pemerintah berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas atas lembaga lembaga pemerintah baik daerah maupun pusat, tuntutan masyarakat yaitu peningkatan kinerja pemerintah yang baik. Pada semester I tahun 2016 BPK memeriksa 533 LKPD 2015 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan ternyata masih ada 9 pemda yang terlambat dalam menyampaikan laporan keungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat opini WTP 312 (58%), WDP 187 (35%) , TPM 30 (6%) dan pendapat TW 4 (1%) (IHPS 2016). Hal ini berari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu diperhatikan supaya menghasilkan laporan keungan yang lebih berkulitas. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah dalam kerangka konseptual akuntansi adalah (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik laporan keuanngan. Informasi dalam laporan keuangan digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

Suatu informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan dikatakan relevan bila informasi yang dihasilkan melikiki *feedback value*, *predictive value* dan disajikan secara tepat waktu. Keandalan artinya informasi yang dihasilkan bebas dari bias, dapat diukur dan jujur, sedangkan ketepatan waktu dapat diidentifikasi dari kecepatan dalam pelaporan. Sumber daya manusia, penerapan SAP, penegendalian intern, pemanfatan teknologi dan komitmen organisasi dapat mempengaruhi relevansi, keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan.

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila suatu informasi tersebut memiliki nilai (Suwardjono, 2005 dalam Winidyaningrum, 2010). Banyak pihak yang mengandalkan informasi dari laporan keuangan yang dipublikasiakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi harus bermanfaat dan bisa dipahami bagi pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan bermanfaat berkaitan dengan ketentuan secara kualitatif yang berhubungan dengan keputusan pemakai dan keyakinan terhadap informasi oleh karena itu kriteria secara umum disebut karakteristik kuantitatif atau kualitas informasi. Laporan keuangan merupakan catatan informasi pada periode tertentu yang dihasilkan oleh orang yang berkompeten sehingga kompetensi sumber daya manusia dibutuhkan supaya menghasilkan laporan keuangan yang sesuai karakteristik laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengatur tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah berisi tentang pertanggungjawaban pemerintah yaitu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntanbilitas dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pusat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan supaya menghasilkan laporan keungan yang berkulitas. Dimana kompetensi manusia dilihat dari kegiatan merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan tugas (Wati dkk,2014).

Kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia dilihat dari penyelesaian dan pencapaian kinerja. Ketika kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki rendah maka efektifitas dan efesiensi pekerjaan yang dilesesaikan kurang baik. Kompetensi sumber daya manusia dapat mempersingkat waktu pembuatan laporan keuangan karena SDM memiliki pemahaman dan pengetahuan akuntansi sehingga kulitas laporan keuangan semakin baik dan tepat waktu, dimana hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002: 146).

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber daya manusia berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan informasi dari laporan keuangan tersebut yang bekualitas (andal). Kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik ( Sudrianti dkk, 2016), hal tersebut berbeda dengan pendapat Husna Fadilla (2013) dalam penelitiannya menyebutkan kualitas atau kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan.

Untuk mewujudkan laporan keuangan yang mempunyai informasi akuntansi sehingga dapat mencapai suatu tujuan maka diperlukan adanya suatu sistem pengendalian yang memadahi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Apabila penerapan sistem pengendalian intern berjalan dengan baik maka nilai informasi yang dihasilkan akan baik, begitu juga apabila penerapan sistem pengendalian intern tidak berjalan baik maka informasi yang dihasilkan kurang baik (Armando,Gerry:2013). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah (2013) yang menyatakan penerapan sistem pengendalian intern baik maka nilai informasi yang dihasilkan baik juga.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi kendali sistem akuntansi yang diterapkan di instansi tersebut. Dimana sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan kegiatan, prosedur, peraturan dalam mencatat mengumpulkan mengolah data akuntansi menjadi laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dengan adanya penerapan SAP dengan basis *accrual* kualitas laporan keuangan berguna dalam mengambil keputusan.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan (PP Nomor 71 tahun 2010), standar ini mewajibkan bagi entitas untuk melaporkan upaya dan hasil yang dicapai dalam periode tertentu. Standar akuntansi yang ditetapkan saat ini adalah standar akuntansi berbasis *accrual* yang sebelumnya menggunakan basis kas. Standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu syarat supaya laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dimana dibutuhkan sistem akuntansi keuangan daerah supaya menghasilkan laporan keuangan yang berkulitas. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berisi tahapan pengumpulan, mencatatat dan menyajikan laporan pertanggungjawaban APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007), apabila belum terdapat pemahaman terhadap sistem akuntansi tersebut menghambat penyusunan laporan keuangan. Pemerintah telah berusaha membuat laporan keuangan berdasarkan standar tetapi tidak semua sumber daya manusia dalam membuat laporan keuangan memahami sistem akuntansi.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, untuk menindak lanjuti pembangunan yang sejalan dengan tata kelola yang baik, pemerintah dan pemetintah daerah berkewajiban memanfaatakan dan mengembangkan kemajuan teknologi dalam mengelola keuangan daerah dan menyajikan informasi untuk pubik. Ketika pemanfaatan teknologi yang dipakai semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik karena dalam penyajian maupun proses pengolahan transaksi pemanfatan teknologi bisa mempercepat proses.

Pegawai dan pimpinan yang melaksanakan tugas tanpa adanya komitmen di dalam organisasi akan mempengaruhi hasil dari kinerja yang dilakukan sehingga laporan yang disusun dan yang disajikan akan mempengaruhinya. Salah satu bentuk dari komitmen seorang pegawai adalah tanggung jawab dan profesionalisme dalam melaksanakan setiap tugas yang ada di setiap fungsi-fungsi. Jika pegawai memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi maka tujuan dari penerapan sistem pengendalian intern akan terwujud dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan akan menjadi baik. Dengan adanya keterlibatan anggota yang tinggi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengolahan informasi, untuk keterlibatan anggota lebih tinggi dalam organisasi salah satu alternatifnya adalah dengan meningkatkan komitmen organisasi mereka. Dengan Komitmen organisasi yang tinggi maka seseorang bersedia meluangkan waktu memproses informasi sesuai dengan deskripsi (Sumarni,Lili 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik (2010) menunjukkan faktor kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sundriani dkk (2015) menunjukkan sumber daya manusia, penerapan SPIP dan penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Mustafa (2011) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan, kemudian hasil penelitian yang dilakukan juga membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah Kota Kendari. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2016) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi , dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini hanya mengambil tiga variabel bebas dari penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) dan menambah dua variabel independen yaitu penerapan SAP dan komitmen organisasi. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah daerah Kota Rembang hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi dari penelitian tentang kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.

## Rumusan Masalah

Laporan keuangan adalah cacatan informasi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengambilan keputuasan dengan memperhatikan akuntanbilitas keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dilihat apakah suatu pemerintah telah melaksanakan pemerintahan yang baik dengan menghasilkan laporan keungan yang berkulias.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah SPI (Sistem Pengendalian Intern) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah komitemen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

## Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Menganalisis pengaruh penerapan SPI (Sistem Pengendalian Intern) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Menganalisis pengaruh penerapan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran bagi SKPD dalam mengembangkan sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi dan komitmen organisasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi kepada penulis tentang kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.